

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Tesis	iii
Kata Pengantar	iv
Halaman Persembahan	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Abstrak	xiv
Abstract	xv
Bab I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Kerangka Pemikiran	5
1.5.1. Komunikasi Organisasi	5
1.5.2. Informasi Publik	8
1.5.3. Pengelolaan Informasi	10
1.6. Kerangka Konsep	15
1.7. Metode Penelitian	17
1.7.1. Obyek Penelitian	19
1.7.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	19
1.7.3. Sumber Data	19
1.7.4. Teknik Pengumpulan Data	21
1.7.5. Metode Analisis Data	22
1.7.6. Validitas Data	23
1.7.7. Limitasi Penelitian	23
Bab II Komunikasi dan Informasi Publik dalam Organisasi	

Pemerintah

2.1. Komunikasi dalam Organisasi Pemerintah	24
2.2. Informasi Publik dalam Organisasi Pemerintah	31
2.3. Organisasi Pemerintah dalam Keterbukaan Informasi Publik	34

Bab III Diskripsi Umum Pengelolaan Informasi Publik di BKKBN Pusat dan Struktur pada Perwakilan BKKBN DIY

3.1. Pengelolaan Informasi pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	40
3.1.1. Pengumpulan Informasi	47
3.1.2. Pengklasifikasian Informasi	49
3.1.3. Pendokumentasian Informasi	50
3.1.4. Pelayanan Informasi	51
3.1.5. Penyelesaian Sengketa Informasi	53
3.1.6. Pelaporan Informasi	54
3.2. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	54
3.3. Struktur dan Tugas Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	56
3.3.1. Bidang Sekretariat	57
3.3.2. Bidang Pengendalian Penduduk	57
3.3.3. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR)	58
3.3.4. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS-PK)	59
3.3.5. Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN)	59
3.3.6. Bidang Pelatihan dan Pengembangan (LATBANG)	60

Bab IV Praktek Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta

4.1. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik di Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	62
4.1.1. Makna Pengelolaan Informasi Publik	62
4.1.2. Pemetaan Regulasi Internal di Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah	

Istimewa Yogyakarta	76
4.1.3. Struktur Organisasi Pengelolaan	81
4.1.3.1. Sub Bagian Umum dan Humas, Bidang Sekretariat	84
4.1.3.2. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi, Bidang Advokasi, pergerakan dan Informasi	88
4.1.3.3. Sub Bidang Data dan Informasi, Bidang Advokasi, Pergerakan dan Informasi	91
4.1.3.4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	95
4.1.4. Mekanisme / Prosedur	99
4.1.5. Capaian	112
4.1.6. Hambatan	117
4.1.6.1. Hambatan pada Sumber Daya Manusia	117
4.1.6.2. Hambatan pada Mekanisme Penyampaian Informasi Publik	120
4.1.6.3. Hambatan pada Sarana dan Prasarana	122
4.2. Analisis Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik di Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	122
4.2.1. Kurang Optimalnya Sarana Prasarana yang Digunakan untuk Penyampaian Informasi Publik	122
4.2.2. Kurangnya Koordinasi antar Penanggungjawab dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	130
Bab V Kesimpulan dan Saran	
5.1. Kesimpulan	133
5.2. Saran	136
Daftar Pustaka	139
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. <i>Framework for the analysis of government communication</i>	7
Tabel 1.2. Atribut Kualitas Informasi	10
Tabel 1.3. Informan dalam penelitian Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik dalam Organisasi Pemerintah (Studi pada Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2016)	20
Tabel. 2.1. Penggolongan Informasi sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008	31
Tabel 2.2. Hasil Penelitian Keterbukaan Informasi Publik di Berbagai Daerah	37
Tabel 3.1. Klasifikasi Informasi Publik pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 136/PER/D2/2011	41
Tabel 4.1. Daftar Peraturan yang ada di Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Penelitian	15
Gambar 2.1. Model Komunikasi Pemerintahan Internal Organisasi Era Pasca Orde Baru	28
Gambar 2.2. Model Komunikasi dalam Perspektif <i>Good Governance</i>	29
Gambar 3.1. Mekanisme Pengumpulan Informasi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	48
Gambar 3.2. Alur Pelayanan Informasi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	53
Gambar 3.3. Struktur Organisasi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	56
Gambar 3.4. Struktur Bidang Sekretariat Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	57
Gambar 3.5. Struktur Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	57
Gambar 3.6. Struktur Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	58
Gambar 3.7. Struktur Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	59
Gambar 3.8. Struktur Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	60
Gambar 3.9. Struktur Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	60
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	82
Gambar 4.2. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	97

Gambar 4.3. Alur Pengelolaan informasi pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	100
Gambar 4.4. Mekanisme permintaan data dan informasi publik dari pengguna informasi	101
Gambar 4.5. Contoh <i>Factsheet</i> dan <i>leaflet</i> yang dibuat oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Menyampaikan Informasi	105
Gambar 4.6. Beberapa informasi program dan kegiatan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimuat pada media cetak	108
Gambar 4.7. Videotron, papan pengumuman, layar monitor dan papan foto untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	113
Gambar 4.8. Pelaksanaan kegiatan apel pagi sebagai salah satu sarana untuk penyampaian informasi kepada pegawai di lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	114
Gambar 4.9. Pintu masuk ruang perpustakaan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa ada keterangan	124
Gambar 4.10. Kegiatan Rapat Pengendalian Program (Radalgram) yang dilaksanakan rutin tiap bulan bersama SKPD kabupaten kota untuk mengetahui pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)	128